
Pengembangan Kebijakan Pendidikan Berbasis Penelitian Di Indonesia

Sri Sarwati¹⁾, Rini Werdiningsih²⁾

^{1,2)}Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945, Indonesia

Email : srisarwati1973@gmail.com

Abstrak

Kebijakan pendidikan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan mendasar, seperti kesenjangan mutu pendidikan antardaerah, rendahnya kompetensi pendidik, ketimpangan akses dan kualitas layanan pendidikan, serta belum optimalnya pemanfaatan data dan hasil penelitian dalam proses perumusan kebijakan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan belum sepenuhnya disusun berdasarkan bukti empiris dan analisis ilmiah yang sistematis. Oleh karena itu, pendekatan kebijakan berbasis penelitian (evidence-based policy) menjadi penting untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan lebih kontekstual, efektif, dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep kebijakan pendidikan berbasis penelitian, mengidentifikasi hambatan dalam penerapannya, serta merumuskan strategi pengembangan kebijakan berbasis bukti dalam tata kelola pendidikan di Indonesia. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui analisis dokumen kebijakan, artikel jurnal nasional dan internasional, serta laporan penelitian relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa hambatan utama meliputi lemahnya mekanisme alih pengetahuan antara akademisi dan pembuat kebijakan, rendahnya literasi riset birokrasi pendidikan, keterbatasan kualitas dan keterbukaan data, serta minimnya evaluasi kebijakan berbasis bukti. Penelitian ini merekomendasikan penguatan ekosistem riset kebijakan pendidikan melalui peningkatan kapasitas analitis, integrasi sistem data pendidikan, dan kolaborasi lintas aktor guna mewujudkan tata kelola pendidikan yang efektif dan akuntabel.

Kata kunci: Kebijakan pendidikan, evidence-based policy, penelitian, administrasi publik

Abstract

Education policy in Indonesia still faces various fundamental challenges, such as disparities in education quality between regions, low teacher competence, inequality in access to and quality of education services, and suboptimal utilization of data and research results in the policy formulation process. These conditions indicate that education policy has not been fully developed based on empirical evidence and systematic scientific analysis. Therefore, an evidence-based policy approach is important to ensure that the resulting policies are more contextual, effective, and sustainable. This study aims to analyze the concept of research-based education policy, identify barriers to its implementation, and formulate strategies for evidence-based policy development in education governance in Indonesia. The method used is a literature study with a descriptive qualitative approach through analysis of policy documents, national and international journal articles, and relevant research reports. The results of the study show that the main obstacles include weak knowledge transfer mechanisms between academics and policymakers, low research literacy among education bureaucrats, limited data quality and transparency, and a lack of evidence-based policy evaluation. This study recommends strengthening the education policy research ecosystem by improving analytical capacity, integrating education data systems, and promoting cross-actor collaboration to achieve effective and accountable education governance.

Keywords: Education policy, evidence-based policy, research, public administration

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan pilar strategis dalam pembangunan nasional karena berperan langsung dalam membentuk kualitas sumber daya manusia, memperkuat daya saing bangsa, serta menjamin keberlanjutan pembangunan sosial, ekonomi, dan politik. Dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai instrumen transformasi sosial yang menentukan mobilitas vertikal masyarakat, pengurangan ketimpangan sosial, serta penguatan kohesi dan integrasi nasional. Oleh karena itu, pendidikan menempati posisi sentral dalam agenda pembangunan

nasional dan menuntut kebijakan publik yang dirumuskan secara cermat, sistematis, serta berorientasi pada kebutuhan nyata masyarakat.

Posisi strategis pendidikan tersebut menempatkan kebijakan pendidikan sebagai salah satu instrumen kebijakan publik yang paling menentukan arah pembangunan jangka panjang. Sebagai kebijakan publik, kebijakan pendidikan idealnya disusun melalui proses rasional yang didasarkan pada data, analisis ilmiah, serta evaluasi empiris yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam perspektif administrasi publik, kualitas kebijakan tidak semata-mata ditentukan oleh komitmen politik atau besaran anggaran, melainkan sangat dipengaruhi oleh kualitas pengetahuan yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Kebijakan pendidikan yang dirumuskan tanpa dukungan bukti empiris berisiko menghasilkan intervensi yang tidak tepat sasaran, inefisien dalam penggunaan sumber daya, serta gagal memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan mutu pembelajaran. Berbagai studi menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan yang tidak berbasis penelitian yang kuat cenderung mengalami kegagalan implementasi dan tidak berkelanjutan (Febriano et al., 2023).

Keterbatasan tersebut tercermin secara nyata dalam praktik tata kelola pendidikan di Indonesia. Hingga saat ini, masih terdapat kesenjangan yang cukup signifikan antara perumusan kebijakan pendidikan di tingkat pusat dan kondisi empiris di lapangan. Disparitas mutu pendidikan antardaerah, rendahnya kompetensi pendidik, ketimpangan akses terhadap sarana dan prasarana pendidikan, serta lemahnya capaian hasil belajar peserta didik menjadi indikator bahwa kebijakan pendidikan belum sepenuhnya dirancang berdasarkan analisis kebutuhan berbasis data yang komprehensif. Laporan Peta Mutu Satuan Pendidikan Tahun 2020 menunjukkan bahwa aspek mutu guru merupakan komponen terlemah dalam sistem akreditasi nasional, yang mengindikasikan bahwa kebijakan peningkatan kompetensi pendidik belum sepenuhnya disusun berdasarkan pemetaan masalah yang akurat dan berbasis bukti (Karwono & Sari, 2021).

Ketidaksesuaian antara kebijakan dan realitas tersebut tidak dapat dilepaskan dari proses perumusan kebijakan pendidikan yang masih kerap dipengaruhi oleh dinamika politik dan perubahan prioritas pemerintahan. Dalam banyak kasus, kebijakan pendidikan dirumuskan secara reaktif sebagai respons atas tekanan publik atau agenda politik tertentu, bukan sebagai hasil dari kajian ilmiah yang mendalam dan berkelanjutan. Tintingon et al. (2023) menegaskan bahwa kebijakan pendidikan di Indonesia masih didominasi oleh pendekatan normatif dan administratif, sehingga kurang adaptif terhadap keragaman kondisi sosial, budaya, ekonomi, serta geografis yang menjadi karakteristik utama sistem pendidikan nasional.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penelitian belum sepenuhnya ditempatkan sebagai fondasi utama dalam seluruh tahapan siklus kebijakan pendidikan. Padahal, dalam kerangka administrasi publik modern, kebijakan berbasis penelitian atau *evidence-based policy* menempatkan hasil riset, data terverifikasi, serta analisis sistematis sebagai dasar utama dalam perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan. Pendekatan ini bertujuan untuk meminimalkan subjektivitas dalam pengambilan keputusan, meningkatkan efektivitas intervensi kebijakan, serta memperkuat akuntabilitas publik. Di berbagai negara, integrasi bukti ilmiah ke dalam kebijakan pendidikan terbukti mampu meningkatkan kualitas kebijakan dan memastikan keberlanjutan dampaknya dalam jangka panjang.

Meskipun demikian, penerapan *evidence-based policy* dalam sektor pendidikan di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan kelembagaan. Rendahnya literasi riset di kalangan birokrasi pendidikan menjadi salah satu faktor utama yang menghambat pemanfaatan hasil penelitian dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, keterbatasan kualitas, keterbukaan, serta integrasi data pendidikan menyebabkan hasil penelitian sulit digunakan secara optimal sebagai dasar perencanaan kebijakan. Herlina (2022) serta Suryanto & Azizah (2024) menegaskan bahwa lemahnya mekanisme knowledge brokering antara akademisi dan pembuat kebijakan memperlebar kesenjangan antara produksi pengetahuan ilmiah dan praktik kebijakan pendidikan.

Hambatan tersebut semakin kompleks ketika dikaitkan dengan dinamika desentralisasi pendidikan di Indonesia. Pendelegasian kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah membuka peluang bagi kebijakan yang lebih kontekstual, namun pada saat yang sama menuntut kapasitas teknokratis dan analitis yang memadai. Dalam praktiknya, kapasitas tersebut belum terdistribusi secara merata. Banyak pemerintah daerah belum memiliki kemampuan yang cukup untuk memanfaatkan data dan hasil penelitian sebagai dasar pengambilan keputusan kebijakan. Akibatnya, kebijakan pendidikan daerah sering kali hanya mereplikasi kebijakan nasional secara administratif tanpa adaptasi berbasis konteks empiris lokal (Febriano et al., 2023), yang pada akhirnya berpotensi memperlebar kesenjangan mutu pendidikan antardaerah.

Seiring dengan itu, tantangan kebijakan pendidikan semakin meningkat dalam era transformasi digital. Digitalisasi pendidikan, termasuk pemanfaatan teknologi pembelajaran dan sistem data pendidikan, menuntut kebijakan yang dirancang berdasarkan kajian empiris mengenai kesiapan infrastruktur, kompetensi digital pendidik, serta kesenjangan akses teknologi. Bariah (2023) menunjukkan bahwa kebijakan digitalisasi pendidikan di Indonesia belum sepenuhnya didukung oleh penelitian yang memadai, sehingga implementasinya belum memberikan dampak optimal terhadap peningkatan mutu pembelajaran dan berpotensi memperkuat ketimpangan yang telah ada.

Berbagai penelitian terdahulu telah membahas kebijakan pendidikan dari beragam perspektif, seperti implementasi program, perubahan kurikulum, maupun digitalisasi pembelajaran. Namun demikian, kajian yang secara komprehensif mengulas konsep, hambatan, serta strategi pengembangan kebijakan pendidikan berbasis penelitian dalam perspektif administrasi publik masih relatif terbatas. Sebagian besar studi belum secara eksplisit menempatkan *evidence-based policy* sebagai kerangka utama dalam membaca persoalan kebijakan pendidikan secara sistemik. Keterbatasan tersebut menunjukkan adanya celah penelitian (*research gap*) yang perlu diisi melalui kajian yang lebih mendalam dan terintegrasi.

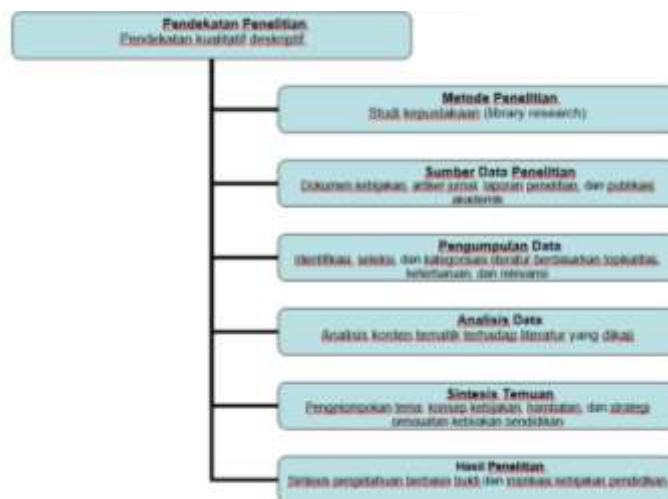
Bertolak dari kondisi tersebut, penelitian ini difokuskan pada permasalahan bagaimana kebijakan pendidikan berbasis penelitian dapat dikembangkan secara efektif dalam konteks tata kelola pendidikan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep dan prinsip kebijakan pendidikan berbasis penelitian, mengidentifikasi hambatan struktural dan kelembagaan dalam penerapannya, serta merumuskan strategi penguatan ekosistem kebijakan pendidikan berbasis bukti. Melalui kajian ini, diharapkan diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peran penelitian dalam meningkatkan kualitas perumusan dan implementasi kebijakan pendidikan.

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian administrasi publik, khususnya dalam penguatan perspektif *evidence-based policy* pada sektor pendidikan. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan, birokrasi pendidikan, serta pemangku kepentingan lainnya dalam merancang kebijakan pendidikan yang lebih responsif, akuntabel, dan berkelanjutan. Dengan memperkuat integrasi penelitian ke dalam seluruh tahapan siklus kebijakan, kebijakan pendidikan di Indonesia diharapkan mampu menjawab tantangan nyata di lapangan secara lebih terarah dan berdampak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan. Metode ini dipilih untuk menganalisis konsep, tantangan, serta strategi pengembangan kebijakan pendidikan berbasis penelitian melalui telaah sistematis terhadap literatur nasional dan internasional yang relevan. Sumber data penelitian terdiri atas dokumen kebijakan, artikel jurnal, laporan penelitian, dan publikasi akademik terkait *evidence-based policy* dalam sektor pendidikan di Indonesia. Proses pengumpulan data dilakukan melalui

identifikasi, seleksi, dan kategorisasi literatur menggunakan kriteria topicalitas, keterbaruan, dan relevansi terhadap fokus kajian.



Gambar 1. Alur Metode Penelitian

Analisis data dilakukan secara konten analisis tematik, yaitu dengan mengelompokkan temuan-temuan literatur ke dalam tema-tema utama: (1) konsep dan prinsip kebijakan berbasis penelitian; (2) hambatan struktural dan kelembagaan; dan (3) strategi penguatan ekosistem kebijakan pendidikan berbasis penelitian. Metode ini memungkinkan peneliti menghasilkan sintesis pengetahuan berbasis bukti yang komprehensif serta memberikan rekomendasi praktis bagi pengembangan kebijakan pendidikan di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengembangan kebijakan pendidikan berbasis penelitian (*research-based policy*) merupakan prasyarat fundamental dalam meningkatkan kualitas tata kelola pendidikan nasional. Dalam perspektif administrasi publik, kebijakan pendidikan idealnya dirumuskan melalui proses pengambilan keputusan yang rasional, sistematis, serta berlandaskan pada bukti empiris yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Namun demikian, hasil kajian menunjukkan bahwa pemanfaatan penelitian dalam perumusan kebijakan pendidikan di Indonesia masih belum terinternalisasi secara optimal. Penelitian sering kali diposisikan sebagai pelengkap administratif, bukan sebagai fondasi utama dalam menentukan arah dan substansi kebijakan (Febriano et al., 2023; Head, 2016)

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan mendasar antara idealitas kebijakan berbasis bukti dan praktik kebijakan pendidikan di Indonesia. Kebutuhan terhadap kebijakan berbasis penelitian semakin menguat seiring dengan meningkatnya kompleksitas persoalan pendidikan yang bersifat multidimensional. Permasalahan pendidikan tidak hanya berkaitan dengan aspek akademik semata, tetapi juga mencakup kesenjangan mutu antardaerah, rendahnya kompetensi pendidik, ketimpangan akses terhadap layanan pendidikan, serta lemahnya capaian pembelajaran peserta didik. Studi UNESCO (2021) menegaskan bahwa kebijakan pendidikan yang tidak didukung oleh bukti empiris berisiko menghasilkan intervensi yang tidak efektif dan justru memperlebar ketimpangan pendidikan, khususnya di negara berkembang.

Dalam konteks Indonesia, lemahnya integrasi penelitian dalam kebijakan pendidikan tidak dapat dilepaskan dari keterbatasan kapasitas birokrasi dalam memahami dan memanfaatkan temuan ilmiah secara sistematis. Tintingon et al. (2023) menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan masih cenderung bersifat normatif dan administratif, sehingga kurang responsif terhadap data dan hasil penelitian yang mencerminkan kondisi empiris di lapangan. Akibatnya, kebijakan yang dihasilkan sering kali tidak mampu menjawab akar persoalan pendidikan secara

komprehensif dan berkelanjutan. Untuk memperjelas hasil sintesis kajian mengenai kebijakan pendidikan berbasis penelitian, temuan utama penelitian dirangkum dalam Tabel 1.

Tabel 1. Sintesis Hasil Kajian Pendidikan Berbasis Penelitian

Aspek Kajian	Temuan Utama	Implikasi terhadap Kebijakan Pendidikan
Pemanfaatan penelitian dalam kebijakan	Penelitian belum menjadi dasar utama perumusan kebijakan dan masih bersifat pelengkap administratif	Kebijakan berisiko tidak tepat sasaran dan kurang berdampak
Kapasitas birokrasi pendidikan	Literasi riset dan kemampuan analitis birokrasi masih terbatas	Diperlukan penguatan kapasitas teknokratis pembuat kebijakan
Knowledge brokering	Mekanisme penghubung akademisi dan pembuat kebijakan belum optimal	Hasil penelitian sulit diterjemahkan ke dalam kebijakan
Desentralisasi pendidikan	Kapasitas daerah tidak merata dalam pemanfaatan data dan riset	Kebijakan daerah cenderung replikatif dan kurang kontekstual
Digitalisasi pendidikan	Kebijakan digital belum sepenuhnya berbasis kajian empiris	Berpotensi memperlebar ketimpangan pendidikan

Kesenjangan antara kebijakan dan realitas empiris tersebut tercermin secara jelas dalam hasil Peta Mutu Satuan Pendidikan yang menunjukkan bahwa mutu guru masih menjadi aspek terlemah dalam sistem pendidikan nasional. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kebijakan peningkatan kompetensi pendidik belum sepenuhnya dirancang berdasarkan analisis kebutuhan berbasis data yang komprehensif dan berkelanjutan. Karwono & Sari (2021) menegaskan bahwa kebijakan pendidikan yang tidak dilandasi evaluasi berbasis penelitian cenderung bersifat simbolik, administratif, dan kurang memberikan dampak nyata terhadap perbaikan kualitas pembelajaran di satuan pendidikan.

Permasalahan serupa juga terlihat dalam kebijakan kurikulum. Hasil kajian menunjukkan bahwa reformasi kurikulum di Indonesia sering kali dilakukan tanpa evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan sebelumnya. Marliyani (2022) menyatakan bahwa perubahan kurikulum lebih banyak dipengaruhi oleh dinamika politik, tuntutan global, serta perubahan orientasi pemerintahan dibandingkan hasil penelitian longitudinal mengenai kesiapan guru, karakteristik peserta didik, serta kapasitas institusi pendidikan. Akibatnya, implementasi kebijakan kurikulum kerap menimbulkan kebingungan di tingkat pelaksana dan tidak selalu menghasilkan peningkatan mutu pembelajaran yang signifikan.

Temuan tersebut selaras dengan pandangan OECD (2019) yang menegaskan bahwa reformasi kurikulum yang tidak berbasis bukti empiris cenderung mengalami kegagalan implementasi, terutama ketika tidak diiringi dengan penguatan kapasitas pelaksana kebijakan di tingkat sekolah. Dalam konteks ini, kebijakan kurikulum di Indonesia masih menunjukkan lemahnya keterkaitan antara hasil penelitian pendidikan dengan proses pengambilan keputusan kebijakan, sehingga kebijakan yang dihasilkan kurang adaptif terhadap kebutuhan nyata peserta didik dan pendidik.

Hambatan penerapan kebijakan pendidikan berbasis penelitian tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga bersifat epistemik. Banyak hasil penelitian pendidikan tidak dikemas dalam format yang mudah dipahami dan dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan. Kondisi ini menyebabkan hasil penelitian sulit diintegrasikan ke dalam proses perumusan kebijakan yang bersifat praktis dan politis. Nutley et al. (2007) menekankan bahwa tanpa mekanisme penerjemahan pengetahuan (*knowledge translation*) yang efektif, hasil penelitian akan tetap terpisah dari praktik kebijakan publik. Fenomena ini memperlebar *research-policy gap*, yaitu kesenjangan antara produksi pengetahuan ilmiah dan implementasi kebijakan di lapangan.

Kesenjangan tersebut semakin diperkuat oleh dinamika desentralisasi pendidikan di Indonesia. Pemberian kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah membuka peluang bagi kebijakan pendidikan yang lebih kontekstual dan responsif terhadap kebutuhan lokal. Namun demikian, hasil kajian menunjukkan bahwa kapasitas teknokratis dan analitis pemerintah daerah belum merata. Febriano et al. (2023) menunjukkan bahwa banyak pemerintah daerah belum memiliki kemampuan yang memadai dalam memanfaatkan data dan hasil penelitian sebagai dasar perumusan kebijakan. Akibatnya, kebijakan pendidikan daerah sering kali hanya mereplikasi kebijakan nasional secara administratif tanpa adaptasi berbasis konteks empiris lokal.

World Bank (2020) menegaskan bahwa desentralisasi tanpa penguatan kapasitas analitis berpotensi menurunkan efektivitas kebijakan publik dan memperlebar kesenjangan antardaerah. Dalam konteks kebijakan pendidikan, kondisi ini berimplikasi pada semakin lebarnya disparitas mutu pendidikan, terutama antara daerah maju dan daerah tertinggal. Tanpa basis penelitian yang kuat, kebijakan pendidikan daerah berisiko menjadi sekadar instrumen administratif yang tidak berdampak signifikan terhadap peningkatan mutu layanan pendidikan.

Tantangan kebijakan pendidikan semakin kompleks dalam era transformasi digital. Digitalisasi pendidikan membuka peluang besar bagi penguatan kebijakan berbasis data melalui pemanfaatan sistem informasi pendidikan dan teknologi pembelajaran. Namun, hasil kajian menunjukkan bahwa pemanfaatan data digital dalam kebijakan pendidikan di Indonesia masih terbatas. Bariah (2023) menyatakan bahwa kebijakan digitalisasi pendidikan belum sepenuhnya didukung oleh kajian empiris mengenai kesiapan infrastruktur, kompetensi digital guru, serta kesenjangan akses teknologi antardaerah. Akibatnya, implementasi kebijakan digitalisasi belum memberikan dampak optimal terhadap peningkatan mutu pembelajaran.

Selwyn (2016) menegaskan bahwa kebijakan digital pendidikan yang tidak berbasis penelitian berisiko memperdalam ketimpangan pendidikan dan menghasilkan kebijakan yang bersifat teknokratis semata. Dalam konteks Indonesia, digitalisasi pendidikan yang tidak dirancang berdasarkan analisis empiris justru berpotensi memperkuat eksklusi digital bagi kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap teknologi. Hal ini menunjukkan bahwa transformasi digital dalam pendidikan harus didukung oleh kebijakan berbasis penelitian agar mampu memberikan manfaat yang inklusif dan berkelanjutan. Untuk memperjelas keterkaitan antara berbagai hambatan struktural dan kelembagaan yang diidentifikasi dalam kajian ini dengan arah penguatan kebijakan pendidikan berbasis penelitian, sintesis temuan disajikan dalam Tabel 2.

Tabel 2. Hambatan dan Strategi Penguatan Kebijakan Pendidikan Berbasis Penelitian

Hambatan Utama	Deskripsi Hambatan dalam Kebijakan Pendidikan	Strategi Penguatan Kebijakan Berbasis Penelitian
Rendahnya literasi riset birokrasi pendidikan	Birokrasi pendidikan belum memiliki kapasitas analitis yang memadai untuk memahami, menafsirkan, dan memanfaatkan hasil penelitian sebagai dasar perumusan kebijakan	Penguatan kapasitas teknokratis dan literasi riset bagi aparatur pendidikan
Lemahnya mekanisme knowledge brokering	Hasil penelitian pendidikan belum terhubung secara sistematis dengan proses pengambilan keputusan kebijakan	Pembentukan dan penguatan lembaga atau unit penghubung antara akademisi dan pembuat kebijakan
Keterbatasan kualitas dan keterpaduan data pendidikan	Data pendidikan belum terintegrasi dan belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan dan evaluasi kebijakan	Pengembangan sistem data pendidikan yang berkualitas, terbuka, dan terintegrasi
Dampak desentralisasi pendidikan	Kapasitas analitis pemerintah daerah belum merata dalam memanfaatkan data dan penelitian	Penguatan kapasitas perencanaan berbasis data di tingkat daerah
Digitalisasi pendidikan	Kebijakan digitalisasi belum sepenuhnya	Perumusan kebijakan digital

tanpa kajian empiris	didasarkan pada analisis kesiapan infrastruktur dan kompetensi digital	pendidikan berbasis kajian empiris dan kebutuhan lapangan
-----------------------------	--	---

Tabel 2 menunjukkan bahwa setiap hambatan memiliki implikasi langsung terhadap efektivitas kebijakan pendidikan dan menuntut strategi penguatan yang bersifat sistemik dan terintegrasi. Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, pengembangan kebijakan pendidikan berbasis penelitian membutuhkan penguatan ekosistem kebijakan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Penguatan tersebut mencakup pembangunan mekanisme knowledge brokering yang efektif antara akademisi dan pembuat kebijakan, peningkatan literasi riset dan kapasitas analitis birokrasi pendidikan, serta penyediaan data pendidikan yang berkualitas, terintegrasi, dan mudah diakses. Head (2016) menegaskan bahwa keberhasilan *evidence-based policy* sangat ditentukan oleh komitmen kelembagaan dan kapasitas aktor kebijakan dalam memanfaatkan bukti ilmiah secara konsisten dalam seluruh tahapan siklus kebijakan.

Selain itu, penguatan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan satuan pendidikan menjadi elemen kunci dalam mengintegrasikan penelitian ke dalam praktik kebijakan. Kolaborasi ini memungkinkan hasil penelitian tidak hanya berhenti pada ranah akademik, tetapi juga diterjemahkan menjadi rekomendasi kebijakan yang aplikatif dan kontekstual. Dalam jangka panjang, penguatan ekosistem kebijakan berbasis penelitian diharapkan mampu meningkatkan kualitas perumusan kebijakan pendidikan, memperkuat akuntabilitas publik, serta memastikan keberlanjutan kebijakan pendidikan nasional.

Secara keseluruhan, hasil dan pembahasan ini menegaskan bahwa kebijakan pendidikan berbasis penelitian bukan sekadar pendekatan teknis, melainkan kebutuhan strategis dalam memperbaiki tata kelola pendidikan di Indonesia. Tanpa integrasi penelitian yang kuat, kebijakan pendidikan berisiko terus bersifat reaktif, simbolik, dan kurang berdampak. Oleh karena itu, penguatan *evidence-based policy* harus menjadi agenda utama dalam reformasi kebijakan pendidikan guna menjawab tantangan pendidikan yang semakin kompleks dan dinamis.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengembangan kebijakan pendidikan berbasis penelitian di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan kultural yang menghambat optimalisasi penerapan *evidence-based policy*. Kebijakan pendidikan cenderung belum sepenuhnya bertumpu pada data dan hasil penelitian empiris, melainkan masih dipengaruhi oleh pertimbangan normatif, administratif, dan politis. Hambatan utama meliputi lemahnya mekanisme alih pengetahuan dari penelitian ke kebijakan, rendahnya literasi riset dan kapasitas analitis birokrasi pendidikan, keterbatasan kualitas dan keterbukaan data pendidikan, serta belum optimalnya evaluasi kebijakan berbasis bukti. Kondisi desentralisasi yang tidak diimbangi dengan penguatan kapasitas teknokratis daerah semakin memperlebar kesenjangan mutu pendidikan antardaerah. Dalam konteks transformasi digital, ketiadaan landasan penelitian yang kuat juga berisiko menghasilkan kebijakan yang tidak inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pengembangan kebijakan pendidikan berbasis penelitian menuntut penguatan ekosistem kebijakan yang terintegrasi melalui peningkatan kualitas data, penguatan kapasitas birokrasi, serta kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah, akademisi, dan satuan pendidikan agar kebijakan yang dihasilkan lebih kontekstual, efektif, dan berdampak nyata.

REFERENSI

- Bariah, W. A. S. (2023). Arah kebijakan pemerintah di bidang pendidikan yang berbasis teknologi. *Jurnal Inovasi Pendidikan*, 11, 287–296.
- Daud, Y. M. (2024). Perkembangan kebijakan pendidikan di Indonesia: A systematic literature review. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, 13(1), 115–131.

- Elvarisna, S., Sari, R., Zahara, S., Marsena, M., & Rahmi, S. (2024). Analisis kebijakan pendidikan dan tenaga kependidikan. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 5(2), 1174–1182.
- Erisnaentin, R., Putri, A. R., & Wahyuni, S. (2024). Digital learning policy and educational inequality in developing countries. *Journal of Education Policy*, 39(2), 215–230.
- Febriano, R. D., Yuadi, I., & Administrasi, D. (2023). Analisis bibliometrik kebijakan berbasis bukti dalam bidang pendidikan. *Jurnal Administrasi Publik*, 17, 167–184.
- Handayani, R., Apriani, B. K., & Mustari, M. (2025). Pemanfaatan Rapor Pendidikan dalam perencanaan berbasis data untuk meningkatkan mutu sekolah di SDN 44 Ampenan. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 10, 336–342.
- Head, B. W. (2016). Toward More “Evidence-Informed” Policy Making? *Public Administration Review*, 76(3), 472–484. <https://doi.org/10.1111/puar.12475>
- Herlina, D. (2022). Transparansi data dan partisipasi publik dalam kebijakan pendidikan di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Pendidikan Nasional*, 8(2), 155–168.
- Karwono, H., & Sari, B. S. (2021). Peta mutu satuan pendidikan di Indonesia berdasarkan akreditasi tahun 2020. *Jurnal Evaluasi Pendidikan*, 14, 1–10.
- Mardiasmo, T., & Rahman, F. (2024). Pengelolaan kinerja pendidikan berbasis data: Pendekatan result-based management di pemerintahan daerah. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 9(1), 44–59.
- Marliyani, T. M. (2022). Analisis kebijakan kurikulum baru dalam perspektif pedagogik kritis: Telaah kritis kebijakan pendidikan Indonesia. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(5).
- Munir, I. M. (2025). Dinamika kebijakan pendidikan inklusif di Indonesia: Analisis bibliometrik literatur. *Jurnal Pendidikan Inklusif*, 26–35.
- Nurhasanah, I. (2023). Digitalisasi kebijakan publik dan transformasi data pendidikan di Indonesia. *Jurnal Transformasi Digital Pemerintahan*, 2(3), 77–90.
- Nutley, S. M., Walter, I., & Davies, H. T. O. (2007). Using evidence: How research can inform public services. *Policy Press*.
- OECD. (2019). *Education Policy Outlook 2019: Shaping responsive and resilient education in a changing world*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/2b8ad56e-en>
- Selwyn, N. (2016). Education and technology: Key issues and debates. *Bloomsbury Academic*.
- Suryanto, A., & Azizah, R. (2024). Kolaborasi akademik dan pemerintah dalam penguatan evidence-based policy pendidikan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Kebijakan Publik*, 5(2), 101–115.
- Tintingon, J. Y., Lumapow, H. R., & Rotty, V. N. J. (2023). Problematika dan Perubahan Kebijakan Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 9(2), 798–809. <https://doi.org/10.31949/educatio.v9i2.5088>
- UNESCO. (2021). *Reimagining our futures together: A new social contract for education*.
- World Bank. (2020). *Improving education service delivery in Indonesia*.
- Zagoto, P., & Murniarti, E. (2024). Analisis kebijakan pendidikan dalam membangun kerangka pengambilan keputusan berbasis data untuk meningkatkan mutu pendidikan berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 3. *Jurnal Pendidikan Nasional*, 8, 27668–27673.